

Judul : Penting Untuk Jadi Payung Hukum
Tanggal : Selasa, 03 Agustus 2021
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 4

Penting untuk Jadi Payung Hukum

Pengesahan RUU PKS sangat mendesak karena Indonesia belum memiliki aturan yang mendasar untuk melindungi dan memulihkan korban.

ANDHIKA PRASETYO
andhika@mediaindonesia.com

KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) memandang Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) harus segera disahkan karena dibutuhkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan sistem pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

"UU tersebut akan menjadi payung hukum dalam menuntaskan kasus-kasus kekerasan seksual yang marak terjadi di masyarakat," ujar Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPPA Ratna Susianawati.

Ia mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, kekerasan seksual, khususnya terhadap perempuan dan anak terus meningkat dan kian mengkhawatirkan. Berdasarkan catatan Komnas Perempuan, pada 2019, terjadi 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani. Angka tersebut naik 6% dari tahun sebelumnya yang berjumlah 406.178 kasus.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto juga melihat pengesahan RUU PKS sangat mendesak karena Indonesia be-



PENYAMAAN PERSEPSI: Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya (kiri) bersama anggota lainnya mendengarkan paparan secara virtual dari anggota DPR Fraksi Partai NasDem Taufik Basari dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) terkait dengan penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7). Rapat terus bergulir untuk mempercepat penyamaan persepsi atau pandangan terhadap usulan dan fraksi ke naskah RUU PKS.

lum memiliki aturan yang mendasar untuk melindungi dan memulihkan korban. RUU PKS yang diusulkan Komisi Nasional Antikekerasan terhadap perempuan sejak 2012 juga dirumuskan berdasarkan data empiris yang dicatat setiap tahun.

Sulistyowati mengatakan dampak kerusakan yang timbul akibat kekerasan seksual tidak hanya ter-tuju kepada korban, tapi juga telah melukai bangsa. Selain itu, urgensi

kehadiran UU PKS terkait dengan pertaruhan martabat Indonesia di kancah pergaulan internasional.

"Ada seruan-seruan internasional yang Indonesia harus ikut seperti SDGs (*sustainable development goals*), konvensi-konvensi internasional, yang menuntut kita mau atau tidak dianggap sebagai bangsa yang bermartabat dalam pergaulan global?" kata Sulis, Jumat (23/7).

Menurut Sulis, Kitab Undang-Un-

dang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak cukup untuk memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban sebab kekerasan seksual hanya dimasukkan ke norma kejahatan dan kesusilaan. Padahal, lanjutnya, kekerasan seksual bukan hanya masalah kesusilaan, melainkan juga kejahatan terhadap kemanusiaan.

Ia mencontohkan banyaknya korban kekerasan seksual yang akhirnya mati setelah diperkosa. Selain

itu, kekerasan seksual juga terbukti telah meninggalkan trauma yang besar maupun cacat seumur hidup bagi korban. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan UU PKS yang bersifat *lex specialis* dari KUHP. "Kekerasan seksual didefinisikan sangat lengkap dalam RUU ini. Kenapa RUU ini begitu bagus? Karena berangkat dari pengalaman-pengalaman korban, misalnya, ada kejahatan *catcalling*."

Samakan persepsi

Sejauh ini, Panitia Kerja (Panja) RUU PKS terus melakukan dialog untuk mempercepat penyamaan persepsi atau pandangan. Ketua Panja RUU PKS Willy Aditya menyebut dialog tersebut dilakukan untuk mengakomodasi usulan dari para fraksi ke naskah RUU PKS.

"RUU PKS sekarang prosesnya masih proses penyusunan di Baleg. Nanti setelah disimpulkan tim ahli, akan disampaikan ke panja pada masa sidang berikutnya," kata Willy.

Menurut Willy, penting bagi Baleg untuk memastikan bahwa naskah RUU PKS tetap sesuai dengan basis sosiokultural, yakni Pancasila. Penyusunan RUU PKS harus berangkat dari nilai-nilai kearifan lokal dengan tetap menjunjung tinggi semangat pembebasan dan perlindungan yang modern.

"Jadi tidak hanya satu pihak, tapi juga mengakomodasi semuanya untuk memulihkan kaum perempuan dan anak-anak," ungkapnya.

Willy yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Baleg tersebut mengatakan bahwa mayoritas fraksi memberikan respons dukungan pembahasan RUU PKS dengan sejumlah perbaikan. Kendati demikian, dirinya tidak menampik bahwa memang masih ada pihak yang menolak pembahasan RUU PKS.

"Namun, alasannya dianggap tidak terlalu berdampak besar terhadap pembahasan karena memiliki semangat yang sama, yakni memulihkan perempuan dan anak. Artinya, secara substansi tidak terlalu menjadi gangguan. Tinggal kemudian *packaging*-nya," tambah anggota Komisi XI DPR RI tersebut. (Pra/Uta/P-1)